Journal of Aafiyah Health Research (JAHR) 2023. Vol. 4, No. 1. Page 48-63
https://doi.org/10.52103/jahr.v4i1.1520
P-ISSN: 2722-4929, E-ISSN: 2722-4945

JOURNAL OF AAFIYAH HEALTH RESEARCH (JAHR)

Publisher: *Postgraduate Program, Universitas Muslim Indonesia*
Journal Homepage:
http://pascaumi.ac.id/index.php/jahr/index

Original Article

Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Sigi

Strategy to Accelerate Stunting Reduction in Sigi Regency

Rika Fitrauni[1], Arman[2], Haeruddin[3], Andi Surahman Batara[4], *Nurmiati Muchlis[5]

[1]*Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi*
[2]*Magister Program in Public Health, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia*

Article History
Received: 16 January 2023
Revised: 20 February 2023
Accepted: 19 April 2023

Keywords: *Strategi; Stunting; Aksi Konvergensi*

Corresponding Author:
nurmiati.muchlis@umi.ac.id

ABSTRAK

Latar Belakang: Kejadian *stunting* merupakan salah satu masalah gizi yang dialami oleh balita di dunia. Saat ini Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi *stunting* yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan menengah lainnya. Berdasarkan data *stunting* JME, UNICEF World Bank tahun 2020, prevalensi *stunting* Indonesia berada pada posisi ke 115 dari 151 negara didunia. Angka *stunting* Indonesia menurun dari 29% pada 2015 menjadi 27.6% pada tahun 2017. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi percepatan penurunan *stunting* di kabupaten sigi.

Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan informan menggunakan *purposive sampling*. Informan penelitian sebanyak 13 orang.

Hasil: Analisa situasi menggunakan data sebaran stunting sesuai dengan cakupan untuk menentukan lokasi prioritas, selanjutnya ditetapkan 25 Desa sebagai lokasi khusus dalam pelaksanaan aksi konvergensi, menyusun rencana kegiatan berdasarkan matriks hasil Analisa Situasi pada Aksi 1, Rembug stunting menghasilkan komitmen dalam Aksi Percepatan Penurunan Stunting dengan melibatkan seluruh lintas sektor. tersedianya regulasi berupa Peraturan Bupati Sigi Nomor 14 Tahun 2020. Membentuk Kader Pembangunan Manusia. Memiliki data yang menjadi prioritas penanganan *stunting*. Pengukuran pertumbuhan dan perkembangan dilakukan oleh tenaga kesehatan secara rutin. review kinerja melaporkan aspek-aspek berupa Reviu capaian target output, Reviu serapan anggaran dan Reviu permasalah dan kendala.

Kesimpulan: Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi telah melakukan upaya percepatan penurunan *stunting* dengan melaksanakan pilar strategi penurunan *stunting* melalui penerapan 8 aksi konvergensi memperlihatkan terjadinya penurunan persentase kasus *stunting* dalam kurun waktu 1 tahun terakhir dimana tahun 2020 sebesar 16,59% turun menjadi 14,40% ditahun 2021.

LATAR BELAKANG

Arah pembangunan jangka menengah (RPJMN) bidang kesehatan tahun 2020-2024 yakni meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (*primary health care*) dengan mendorong upaya promotive dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

Kejadian *stunting* merupakan salah satu masalah gizi yang dialami oleh balita di dunia. Saat ini Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi *stunting* yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan menengah lainnya. Berdasarkan data *stunting* JME, UNICEF World Bank tahun 2020, prevalensi *stunting* Indonesia berada pada posisi ke 115 dari 151 negara

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

didunia. Angka *stunting* Indonesia menurun dari 29% pada 2015 menjadi 27.6% pada tahun 2017 (LPPKM UNNES, 2022) .

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). *Stunting* mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak sehingga berisiko lebih tinggi menderita penyakit kronis pada masa dewasanya. Permasalahan *stunting* terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru akan terlihat ketika anak sudah menginjak usia dua tahun. Secara ekonomi, permasalahan *stunting* akan menjadi beban bagi negara terutama akibat meningkatnya pembiayaan di bidang Kesehatan (Khairani, Mursyita and Darmawan, 2020).

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 menunjukkan sebanyak 30,8% balita mengalami *stunting*. Pada tahun 2019 prevalensi *stunting* turun menjadi 27,7% (SSGB, 2019). Akan tetapi capaian tersebut masih dibawah dari target nasional sebesar 14% pada tahun 2024. Angka tersebut masih di atas batas yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu 20%. Persentase *stunting* Indonesia juga lebih tinggi dibanding sejumlah negara Asia Tenggara seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Thailand. Oleh karena itu tentunya membutuhkan kerjasama antar seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk meningkatkan upaya pencegahan serta penanggulangan *stunting* di Indonesia secara berkelanjutan (LPPKM UNNES, 2022).

Di Indonesia Titik persebaran *stunting* hampir terjadi di seluruh provinsi, pada tahun 2018 provinsi dengan *stunting* tertinggi adalah Sulawesi Barat dengan persentase di atas 30% dan Nusa Tenggara Timur dengan persentase diatas 40%. Terdapat 14 provinsi yang memiliki tingkat *stunting* di atas nasional (27,6 persen). Daerah dengan *stunting* tertinggi berada di kawasan tengah dan timur Indonesia seperti Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua. Hampir semua provinsi di pulau tersebut memiliki tingkat *stunting* diatas rata-rata nasional. Angka Sulawesi Tengah sendiri berada pada angka 32,3% (Kemenkes RI, 2018).

Strategi Percepatan Pencegahan *stunting* di Indonesia diselenggarakan pada semua tingkatan pemerintah dengan melibatkan berbagai institusi pemerintah yang terkait dan institusi non-pemerintah, seperti swasta, masyarakat madani, dan komunitas. Untuk mencapai hasil yang optimal berdasarkan prinsip efisien dan efektif dalam pencegahan *stunting*, dipandang perlu dilakukan konvergensi dalam program/kegiatan (TNP2K RI, 2018)

Konvergensi didefinisikan sebagai sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan sama pada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah *stunting* (TNP2K RI, 2018). Upaya konvergensi pencegahan *stunting* dilakukan dalam 8 aksi konvergensi. Aksi konvergensi adalah instrumen dalam bentuk kegiatan yang digunakan untuk meningkatkan intervensi gizi dalam penurunan *stunting* melalui 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan *stunting* (Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, 2021).

Penanganan *stunting* di Kabupaten Sigi sudah dimulai pada tahun 2020, hal ini diperkuat dengan adanya Peraturan Bupati Sigi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* yang diantaranya mengatur mengenai strategi, intervensi, tanggung jawab pelaksanaan konvergensi, serta mengatur sistem evaluasi dan pelaporan (Pemerintah Kabupaten Sigi, 2020). Selanjutnya diterbitkan pula Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor 440-017 Tahun 2021 tentang Tim Intervensi Upaya Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi Di Kabupaten Sigi Tahun 2021, dimana Surat Keputusan ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan upaya penurunan *stunting* yang harus dilaksanakan secara terpadu, terencana, dan bersinergi melalui pendekatan intervensi yang terintegrasi (Pemerintah Kabupaten Sigi, 2021).

Aksi Konvergensi telah dilaksanakan pula di Kabupaten Sigi berdasarkan Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* melalui 8 tahapan konvergensi. 8 tahapan konvergensi ini dilakukan untuk meningkatkan cakupan layanan intervensi gizi serta pengintegrasian layanan program pada tiap

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

perangkat daerah, dengan semboyan "Membangun Komitmen Bersama Untuk Kabupaten Sigi Bebas *Stunting*". (Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi, 2021).

Berdasarkan hasil riset Kesehatan dasar (Riskesdas 2018) menunjukkan penurunan prevalensi balita di tingkat nasional sebesar 6,4 % selama periode 5 tahun, yaitu 37,2% pada tahun 2013 menjadi 30,8 % pada tahun 2018. Pada rencana pembangunan jangka menegah nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024 telah ditergetkan pada tahun 2024 prevalensi *stunting* turun menjadi 14% (Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi, 2021).

Di Kabupaten Sigi prevalensi *Stunting* Baduta usia 0-23 bulan dari 20,2% pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 16,59% pada tahun 2020, dan pada tahun 2021 menjadi 14,40%, dalam kurun waktu dua tahun terjadi penurunan sebesar 2,19%. Namun terjadi trend peningkatan yang cukup tinggi pada beberapa kecamatan *stunting* cukup tinggi diantaranya Kecamatan Pipikoro, Kulawi Selatan, Dolo, Tanambulava, Biromaru, Marawola, dan Kinovaro. Dalam upaya percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Sigi ditetapkan 10 (sepuluh) desa lokasi fokus (lokus) terpilih yang di tetapkan berdasarkan dari hasil analisis situasi data cakupan 20 Indikator penurunan *stunting* terintegrasi. Desa lokus terpilih dilakukan intervensi baik spesifik maupun sensitive di tahun berjalan (2020) dan tahun rencana (2021).

Secara garis besar terjadi penurunan persentase kasus *stunting* dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir dimana tahun 2020 sebesar 16,59% turun menjadi 14,40% ditahun 2021. Namun dapat dilihat trend peningkatan sebaran *stunting* pada 7 (tujuh) kecamatan mengalami peningkatan angka *stunting* cukup tinggi dibanding tahun sebelumnya diantaranya Kecamatan Pipikoro (26,7 %), Kulawi Selatan (17,8 %), Dolo (18,4 %), Tanambulava (9,9 %), Biromaru (16,1 %), Marawola (10,4%), dan Kinovaro (26,9 %), sementara dan 8 (delapan) kecamatan lainnya berhasil dapat menurunkan kasus *stunting* dari tahun sebelumnya (Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, 2021).

Pelaksanaan intervensi penurunan *stunting* secara umum pada tiap daerah harus dilakukan melalui intervensi gizi spesifik berupa kegiatan yang langsung mengatasi terjadinya *stunting* seperti asupan makanan, infeksi, status gizi ibu, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan dan intervensi sensitif berupa upaya- upaya untuk mencegah dan mengurangi masalah gizi secara tidak langsung, yang pada umumnya dilakukan oleh sektor non kesehatan dengan sasaran Rumah Tangga 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang dapat mengakses layanan 20 indikator penurunan *stunting*.

Untuk pelaksanaan upaya penurunan *stunting* ini diperlukan strategi yang tepat untuk dapat menyelaraskan serta memadukan seluruh proses mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan pemantauan program/kegiatan pemerintah secara konvergen dengan menyelaraskan berbagai sumberdaya yang dimiliki. Selain itu pula perlu dipastikan bahwa pendekatan intervensi yang dilakukan telah terkoordinir, terpadu dan bersama-sama sesuai dengan target serta indikator stratetegi dan konvergensi yang telah ditetapkan oleh pemerintah (TNP2K RI, 2018a).

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi dalam percepatan penurunan *stunting* serta bagaimana pencapaian indikator dalam aksi konvergensi penurunan *stunting* yang telah dilaksanakan di Kabupaten Sigi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Daerah Kabupaten Sigi pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sigi. Waktu penelitian dilaksanakan pada Juni – Juli 2022. Penentuan informan melalui *purposive sampling*. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu informan kunci 1 orang Sekertaris daerah kabupaten sigi, informan biasa 4 orang Kepala Dinas dan 4 orang Kepala Bidang dan informan tambahan 4 orang Pengelola Tekhnis program *stunting* pada masing-masing perangkat daerah yaitu Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sigi, Dinas Kesehatan Kabupaten

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

Sigi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sigi, Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Sigi. Adapun informasi yang dikumpulkan dari responden menggunakan teknik *indepth interview* dengan instrument berupa pedoman wawancara, lembar observasi dan dokumentasi. Tekhnik analisis data dalam penelitian ini menggunakan alur menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis dilakukan dengan 3 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL PENELITIAN

Tabel 1. Karakterisitik Informan

Informan	Umur	Jenis Kelamin	Jabatan
MB	59 Tahun	Laki-laki	Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi
SS	55 Tahun	Laki-laki	Kepala BP3D
SM	56 Tahun	Laki-laki	Kepala Dinas Kesehatan
AC	56 Tahun	Laki-laki	Kepala Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan
RS	56 Tahun	Laki-laki	Kepala Dinas PMD
BT	57 Tahun	Laki-laki	Kepala Bidang Penataan Desa
AK	36 Tahun	Perempuan	Kepala Bidang UKM
YK	46 Tahun	Perempuan	Kepala Bidang Ketersediaan Pangan
MR	46 Tahun	Laki-laki	Kepala Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia
NS	47 Tahun	Perempuan	Pengelola Teknis Kesehatan keluarga
ID	41 Tahun	Perempuan	Pengelola Teknis Penggerak Masyarakat
IM	46 Tahun	Perempuan	Pengelola Teknis Analisis Perencanaan
AD	48 Tahun	Laki-laki	Pengelola Teknis Sumber Daya Pangan

Berdasarkan tabel di atas dilihat dari segi umur sebagian besar informan adalah dewasa tua dari usia 36-59. Dan untuk karakteristik jenis kelamin Mayoritas informan berjenis kelamin laki-laki.

Analisis Situasi

Proses dimana pemerintah kabupaten/kota mengumpulkan data/informasi dalam mengidentifikasi lokasi-lokasi yang memerlukan prioritas penanganan sehingga perencanaan dan penganggaran intervensi gizi tepat sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan diidentifikasi bahwa dalam kegiatan Analisa Situasi dilakukan menggunakan data sebaran *stunting* sesuai dengan cakupan untuk menentukan lokasi prioritas, dan selanjutnya ditetapkan 25 Desa sebagai lokasi khusus dalam pelaksanaan aksi konvergensi. Berikut pernyataan beberapa informan pada saat penelitian :

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

"Kegiatan Analisa situasi ini kami lakukan untuk menentukan lokasi prioritas, karena lokasi-lokasi prioritas ini nantinya yang akan menjadi fokus kami, setelah diketahui data sebaran stunting maka ditentukan lokasi khusus " (SS, 4 Juni 2022).

"Kami melakukan Analisa situasi untuk menentukan lokasi prioritas karena dalam panduan konvergensi itu kan, Analisa situasi sebagai langkah awal penanganan stunting" (MR, 5 Juni 2022).

Pernyataan informan di atas sesuai dengan pernyataan informan lainnya yang mengatakan bahwa Analisa situasi dilakukan untuk menentukan lokasi prioritas, selanjutnya ditetapkan 25 Desa sebagai lokasi khusus dalam pelaksanaan aksi konvergensi. Adapun desa tersebut antara lain Marawola Barat, Marawola, Kinovaro, Sigi Biromaru, Dolo, Dolo Barat, Tanambulava, Palolo, Nokilalaki, Gumbasa, Dolo Selatan, Lindu, Kulawi, kulawi selatan, Pipikoro….

"Dalam Analisa situasi kami menentukan lokasi prioritas berdasarkan data sebaran stunting, dan hasilnya ditetapkan 25 desa sebagai lokasi khusus, desa-desa itu ada marawola barat, Marawola, Kinovaro, Sigi Biromaru, Dolo, Dolo Barat, Tanambulava, Palolo, Nokilalaki, Gumbasa, dolo selatan, lindu, kulawi, kulawi selatan, pipikoro dan lainnya*" (IM, 5 Juni 2022).*

Hasil wawancara didukung oleh telaah dokumen yang dilakukan oleh peneliti didapatkan hasil analisis sebagai berikut: Peta sebaran *stunting* di kabupaten sigi dan Prevalensi *Stunting* (usia 0-23 bulan) per kecamatan. Berdasarkan informasi dari responden data-data hasil identifikasi lokasi-lokasi yang memerlukan prioritas penanganan inilah yang akan dibuatkan perencanaan dan penganggaran intervensi gizi agar tepat sasaran.

Rencana Kegiatan

Merupakan tahapan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil analisis situasi ke dalam tindakan konkret sehingga rekomendasi tersebut dapat direalisasikan pada tahun berjalan dan/atau tahun rencana. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan diidentifikasi bahwa setelah dilakukannya Analisa situasi dilakukan Rencana Kegiatan, Rencana kegiatan yang telah disusun selanjutnya dituangkan ke dalam rincian kegiatan dan selanjutnya di fokuskan pada 25 lokasi khusus yang telah ditentukan. Seperti pernyataan beberapa informan berikut:

"*Berdasarkan panduan yang ada memang dari 8 aksi konvergensi ini setelah dilakukan Analisa situasi mesti secepatnya dilakukan rencana kegiatan nah rencana kegiatan ini kami buat berdasarkan hasil Analisa situasi lalu dibuat rincian kegiatan agar bisa dilaksanakan secepatnya dalam tindakamn yang konkret, kalau bisa ditahun berjalan atau ditahun depan, dalam pelaksanaanya tentu disesuaikan dengan perencanaan dan penganggaran yang ada* (SS, 4 Juni 2022).

"*Jadi setelah kami melakukan analisa situasi kami menyusun rencana kegiatan berdasarkan matriks hasil Analisa Situasi pada Aksi pertama. Perencanaan tersebut disusun berdasarkan pada tahun berjalan dan tahun rencana*"(MR, 5 Juni 2022).

"*Kami melakukan rencana kegiatan, rencana kegiatan yg disusun ini berdasarkan hasil rekomendasi Analisa situasi, kalua tahun kemarin hasilnya terdapat 25 desa yang menjadi fokus kami* " (IM, 5 Juni 2022).

Berdasarkan wawancara diketahui terdapat 25 masalah yang selanjutnya dibuatkan rencana kegiatan dapat terlihat kegiatan yang telah direalisasikan serta terlihat rekomendasi hasil kegiatan tersebut. Kegiatan-kegiatan yang telah ada disinergikan antar perangkat daerah. Seperti pernyataan informan berikut :

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

"*Ada 25 masalah yang selanjutnya dijadikan sebagai rencana kegiatan, rencana kegiatan ini juga dilakukan bersama-sama dan terintegrasi*. (IM, 5 Juni 2022).
"Peta kerawanan pangan digunakan pula dalam mengidentifikasi intervensi yang ada" (AC,06 Juni 2022).
"KRPL menjadi focus kita karena merupakan 21 indikator dalam intervensi". (YK,06 Juni 2022).
"Desa KRPL kita masih sangat kurang jumlahnya karena keterbatasan anggaran" (AD,06 Juni 2022).

Berdasarkan pernyataan di atas terdapat 25 masalah yang selanjutnya dibuatkan rencana kegiatan dapat terlihat kegiatan yang telah direalisasikan serta terlihat rekomendasi hasil kegiatan tersebut. Kegiatan-kegiatan yang telah ada disinergikan antar perangkat daerah.

Rembuk Stunting

Merupakan wadah para pimpinan dan pemangku kepentingan pemerintah kabupaten/kota untuk menggalang dan mendeklarasikan komitmen terhadap isu *stunting* untuk menjadi prioritas bersama lintas sektor, kecamatan, desa, dan berbagai pemangku kepentingan di wilayah pemerintah kabupaten/kota.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan Rembug *Stunting* dilakukan untuk memperkuat dan membangun komitmen pada tiap perangkat daerah terdahap isu *stunting*, hasil komitmen itu berupa kesepakatan dalam Aksi Percepatan Penurunan *Stunting* dengan melibatkan seluruh lintas sektor, kecamatan, desa, akademisi, NGO, dan berbagai pemangku kepentingan di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi. Seperti penyataan informan berikut :

"Jadi permasalahan stunting ini tidak hanya menjadi tugas dari dinas Kesehatan tapi juga melibatkan berbagai lintas sector untuk menanganinya, maka kami melakukan rembuk stunting dengan mengundang berbagai pihak, sehingga dapat tercapai kesepakatan bersama, kegiatan ini juga untuk memastikan terjadinya integrasi pelaksanaan intervensi penurunan stunting secara bersama-sama antara OPD" (MB, 04 Juni 2022).

"Pemerintah kabupaten sigi mendukung percepatan Penurunan stunting salah satunya dengan mengadakan rembuk stunting nah hasilnya nanti diharapkan opd terkait mempunyai kesamaan pemahaman untuk penanganan stunting ini dan mereka ikut terlibat dalam penurunan stunting secara bersama-sama antara OPD penanggung jawab layanan dengan sektor/lembaga non-pemerintah dan masyarakat (MB, 04 Juni 2022).

Pernyataan diatas sesuai dengan pernyataan informan lainnya yang menyatakan bahwa untuk mencapai target penurunan prevalensi *stunting* yang paling utama dibutuhkan adalah komitmen bersama multipihak. Kegiatan rembuk *stunting* yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Sigi dengan Tema *"Membangun Komitmen Bersama Untuk Kabupaten Sigi Bebas Stunting"* seperti pernyataan informan berikut:

"Pelaksanaan rembuk stunting ini bertujuan untuk menghasilkan komitmen bersama, nah hasil dari rembuk stunting ini berupa penandatanganan komitmen bersama seluruh komponen terkait baik pemerintah, unsur DPRD, organisasi masyarakat, organisasi agama, organisasi perempuan, organisasi profesi, akademisi serta tokoh masyarakat. " (SS, 5 Juni 2022).

Pernyataan di atas didukung oleh hasil telaah dokumen yang dilakukan oleh peneliti berupa dokumentasi kegiatan rembuk *stunting* dan berita acara hasil rembuk *stunting* di kabupaten sigi

Peraturan Bupati

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

Dukungan regulasi untuk mengoptimalkan peran desa dan masyarakat dalam penurunan *stunting***.** Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan kunci diidentifikasi bahwa untuk untuk mengoptimalkan peran desa dan masyarakat dalam penurunan *stunting* pemerintah daerah telah membuat regulasi, regulasi ini berupa Peraturan Bupati Sigi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* regulasi ini diharapkan dapat mengoptimalkan peran desa dan masyarakat dalam penurunan stuntin. Seperti pernyataan informan berikut :

"Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berupa peraturan bupati sigi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Percepatan Penurunan Stunting peraturan ini untuk mengoptimalkan peran desa dan masyarakat dalam penurunan stunting, peraturan Bupati Sigi ini mengatur mengenai kewenangan desa dalam pelaksanaan intervensi gizi melalui APBD Desa, peran Kecamatan dan Desa, dukungan insentif bagi kader, publikasi dan komunikasi perubahan perilaku". (MB, 4 Juni 2022).

"*Pemerintah Kabupaten Sigi Telah Mengeluarkan Peraturan Bupati Sebagai Bentuk Kebijakan Penanganan Stunting Di Kabupaten Sigi, Peraturan Ini Penting Karena Menjadi Bentuk Dukungan Pemerintah Kabupaten Sigi Dalam Penanganan Stunting* (MB, 4 Juni 2022).

Pernyataan tersebut di dukung oleh telaah dokumen yang dilakukan oleh peneliti adanya peraturan bupati sigi dan dokumentasi kegiatan strakom.

Kader Pembangunan Manusia (KPM)

Kader masyarakat terpilih yang mempunyai kepedulian dan bersedia mendedikasikan diri untuk ikut berperan dalam pembangunan manusia didesa, terutama dalam monitoring dan fasilitasi konvergensi penurunan *stunting*.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan dapat diidentifikasi bahwa selain regulasi, upaya yang dilakukan adalah membentuk tim pembanguna manusia (KPM) yang berjumlah 176 orang dari 176 kader desa. Kader ini dipilih dari masyarakat sekitar, tugas-tugas kader ini melakukan pendataan dan pelaporan secara berkala seperti pernyataan informan dan biasa berikut:

"Kabupaten sigi sudah mencakup 100% karena setiap desa telajh memiliki kader yang dibentuk untuk membantu, kader-kader ini juga diberikan pelatihan sebagai bentuk pembinaan untuk meningkatkan kualitas Kader Pembangunan Manusia agar tiap desa memiliki Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang berdaya" (RS, 04 Juni 2022).

"Dalam pelaksanaan aksi konvergensi pemerintah kabupaten sigi sudah membentuk kader yang berasal dari masyarakat, mereka juga ada SKnya".(BT, 05 Juni 2022).

"Kader-kader yang ada berasal dari 176 desa yang ada diwilayah Kabupaten Sigi, yang telah memiliki SK masing-masing dan berperan aktif didesanya". (ID, 05 Juni 2022).

Pernyataan di atas didukung oleh telaah dokumen yang dilakukan oleh peneliti berupa foto kegiatan pelatihan untuk kader serta SK kader pembangunan manusia (KPM).

Sistem Manajemen Data

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan dapat diidentifikasi bahwa pemerintah kabupaten sigi telah memiliki data yang menjadi prioritas penanganan dalam penanganan *stunting*. Sistem manajemen data di kabupaten sigi mencakup data-data dari setiap indikator, mulai dari data *stunting* sampai dengan cakupan intervensi gizi spesifik dan sensitive. system manajemen data digunakan untuk mendukung pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan sensitive. Seperti pernyataan informan berikut :

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

"*Pemerintah kabupaten sigi memiliki data jumlah kasus stunting per desa, cakupan intervensi per desa serta hasil pemetaan sebaran stunting. Bappeda dan perangkat daerah yang terlibat telah menyepakati dan terus melakukan perbaikan data agar tingkat rincian lebih baik*" (MR, 5 Juni 2022).

"*Sistem manajemen data ini penting, karena mencakup semua kegiatan mulai dari identifikasi kebutuhan data, pengumpulan data hingga pemanfaatan data, pengelolaan data di tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat desa yang di gunakan ini untuk mendukung pelaksanaan aksi-aksi integrasi lainnya*" (MR, 5 Juni 2022).

"*Kami menggunakan system E-PPGBM yang dikelola oleh tenaga gizi di 19 puskesmas, sesuai dengan pedomaan dan anjuran dari Kementerian Kesehatan*" (NS, 5 Juni 2022).

Hasil di atas didukung oleh telaah dokumen yang dilakukan oleh peneliti berupa data-data *stunting*, cakupan intervensi per desa serta hasil pemetaan sebaran *stunting*.

Pengukuran dan Publikasi Stunting

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan dapat diidentifikasi bahwa aksi 7 dalam konvergensi penanganan *stunting* di kabupten sigi yaitu Pengukuran pertumbuhan dan perkembangan dilakukan oleh tenaga kesehatan secara rutin. Beikut pernyataan informan:

"*Aksi ke 7 itu melakukan pengukuran dan publikasi, pengukuran yang pemerintah kabupaten sigi lakukan total cakupan pada tahun 2020 yaitu sebanyak 95,61% dan tahun 2021 itu sebanyak 97% jadi kami sudah melebihi cakupan minimal yang ditargetkan* (SM, 4 Juni 2022).

"*Aksi ke-7 dari 8 aksi konvergensi yang kami lakukan itu melakukan pengukuran lalu hasilnya di publikasikan*" (NS, 4 Juni 2022).

Selain itu pemerintah Kabupaten Sigi juga melakukan publikasi terhadap hasil pengukuran, publikasi dilakukan untuk memperkuat komitmen dalam penurunan *stunting* di kabupaten sigi seperti pernyataan informan berikut:

"*Pada aksi 7 selain melakukan pengukuran itu juga dilakukan publikasi, Pengukuran ini dilakukan oleh petugas Kesehatan, selanjutnya dilakukan analisa, pelaporan, dan publikasi hasil pengukuran yang telah di peroleh melalui web sigiziterpadu.gizi.kemenkes.go.id/."* (AK, 5 Jun 2022).

"*Kami mempublikasikan angka prevalensi stunting tingkat desa hingga kabupaten/kota*". (NS, 4 Juni 2022).

Berdasarkan pernyataan informan di atas dan didukung oleh telaah dokumen yang dilakukan oleh peneliti disimpulkan bahwa pemerintah kabupaten sigi telah melaksanakan aksi ke- 7 yaitu melakukan pengukuran dan publikasi *stunting*. Hasil ini didukung oleh telaah dokumen yang dilakukan oleh peneliti yaitu berupa hasil analisis pengukuran balita stunting tingkat kabupaten sigi.

Review Kinerja

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan dapat diidentifikasi bahwa pemerintah kabupaten sigi telah melakukan review kinerja, review kinerja dilakukan setiap tahun seperti pernyataan infoprman berikut :

"*Pemerintah kabupaten sigi melakukan Review kinerja setiap tahun untuk melihat hasil capaian. Dalam kegiatan review dilaporkan Reviu capaian target output, Reviu serapan anggaran dan Reviu permasalah dan kendala, lalu dilakukan tindak lanjut*, Review kinerja ini juga sebagai evaluasi kinerja OPD di Kabupaten Sigi yang terlibat dalam penanganan *stunting* (MB, 2 Juni 2022).

"Review kinerja dilakukan untuk melihat kinerja selama satu tahun terakhir kami membandingkan antara rencana dan realisasi capaian output (target kinerja), capaian outcome, penyerapan

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

anggaran, dan kerangka waktu penyelesaian, mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pencapaian target kinerja output dan outcome, lalu merumuskan tindak lanjut perbaikan (SS, 4 Juni 2022).

"*Dalam Review Kinerja kami membahas capaian target output, serapan anggaran, serta permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Aksi Konvergensi*"(MR, 5 Juni 2022).

"*Aksi 8 kami laksanakan setiap tahun, ini untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pencapaian target kinerja output dan outcome*" (IM, 5 Juni 2022).

Pernyataan di atas didukung oleh telaah dokumen yang dilakukan oleh peneliti, yaitu dilaksanakannya kegiatan review kinerja serta adanya dokumen hasil tindak lanjut dari Review Kinerja yang dilakukan.

DISKUSI

Analisa Situasi

Dalam upaya percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Sigi, telah dilaksanakan aksi konvergensi I yaitu analisa situasi. Dalam analisa situasi ini Pemerintah Kabupaten Sigi telah menggunakan data sebaran stunting sesuai dengan cakupan untuk menentukan lokasi prioritas, dan selanjutnya ditetapkan 25 Desa sebagai lokasi khusus dalam pelaksanaan aksi konvergensi. Selain itu terdapat peta sebaran stunting di kabupaten sigi. data-data yang telah terhimpun ini merupakan hasil identifikasi lokasi-lokasi yang memerlukan prioritas penanganan sehingga perencanaan dan penganggaran intervensi gizi tepat sasaran.

Hasil Analisa situasi ini sejalan dengan Ditjen Bangda KemenDagri RI (2020) menyatakan bahwa pembelajaran dari keberhasilan di negara-negara lain menunjukkan bahwa efektifitas penurunan *stunting* ditentukan oleh seberapa menyeluruh atau terpadunya intervensi gizi yang menyasar lokasi dan kelompok sasaran prioritas. (Picauly *et al.*, 2020).

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sigi melakukan pemetaan dengan menggunakan 21 indikator untuk dijadikan sebagai panduan dalam menentukan intervensi spesifik maupun sensitive yang diprioritaskan penanganan daerah lokasi khusus tersebut. Berdasarkan teori Data/informasi yang digunakan sekurang-kurangnya mencakup data cakupan intervensi, data outcome intervensi, dan hasil pemetaan program/kegiatan dalam tahun berjalan yang bersumber dari berbagai sumber penggunaan (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2019).

Dalam Analisa Situasi yang dilakukan oleh tim intervensi di Kabupaten Sigi telah teridentifikasi kendala dalam pelayanan utamanya dalam intervensi 1000 HPK. Berdasarkan analisa situasi tersebut selanjutnya dibuat manajemen, daftar intervensi prioritas serta kendala dalam layanan 1000 HPK. Adapun intervensi prioritas serta kendala dalam layanan 1000 HPK. sebagai berikut :

Daftar Intervensi Prioritas; keluarga yang mengikuti Bina Keluarga Balita, orang tua mengikuti kelas parenting, rumah tangga menggunakan sanitasi layak, anak usia 2-6 tahun terdaftar peserta didik di PAUD, KPM PKH yang mendapatkan FDS Gizi dan Kesehatan , keluarga 1000 HPK kelompok miskin sebagai penerima BPNT dan desa menerapkan KRPL.

Kendala/Isu Manajemen Layanan 1000 HPK, Indentifikasi kendala tersebut diharapkan meliputi 4 aspek yakni; proses perencanaan, penganggaran, pemantaun dan pengawasan layanan 1000 HPK, desain pelaksanaan intervensi/pelaksanaan program serta kendala, ketersediaan dan kualitas SDM pelaksanaan, kendala dalam akses layanan dalam sisi penerima manfaat (seperti kendala budaya, biaya, waktu dan lainnya).

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

OPEN ACCESS
P-ISSN: 2722-4929, E-ISSN: 2722-4945

Rencana Kegiatan

Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi telah menyusun rencana kegiatan berdasarkan matriks hasil Analisa Situasi pada Aksi 1. Perencanaan tersebut disusun berdasarkan pada tahun berjalan dan tahun rencana. Rencana kegiatan yang telah disusun selanjutnya dituangkan ke dalam rincian kegiatan dan selanjutnya di fokuskan pada 25 lokasi khusus yang telah ditentukan. Setelah itu, Pemerintah Kabupaten Sigi melakukan monitoring terhadap kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan.

Selain itu Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi memastikan kegiatan yang telah direncanakan telah terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran baik melaui sumber dana APBD maupun APBN. Selain terintegrasi hasil kegiatan yang berisi masalah-masalah yang terjadi selanjutnya dibuatkan rencana kegiatan, realisasi, serta rekomendasi hasil kegiatan.Kegiatan-kegiatan yang telah ada disinergikan antar perangkat daerah.

Hasil ini sejalan dengan teori dalam panduan Konvergensi program percepatan penanganan stunting bahwa upaya percepatan pencegahan stunting akan lebih efektif apabila program intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif dilakukan secara konvergen. Konvergensi penyampaian layanan membutuhkan keterpaduan proses perencanaan, penganggaran, dan pemantauan program/kegiatan pemerintah secara lintas sektor untuk memastikan tersedianya setiap layanan intervensi gizi spesifik kepada keluarga sasaran prioritas dan intervensi gizi sensitif untuk semua kelompok masyarakat, terutama masyarakat miskin. Dengan kata lain, konvergensi didefinisikan sebagai sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama pada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah stunting. Penyelenggaraan intervensi secara konvergen dilakukan dengan menggabungkan atau mengintegrasikan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan bersama (TNP2K RI, 2018a).

Rembug *Stunting*

Dalam Aksi konvergensi yang ke- 3 Pemerintah Kabupaten Sigi telah melaksanakan Rembug Stunting dan telah dilakukan deklarasi pelaksanaan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting.

No.	Aspek Analisis Manajemen Layanan	Kendala yang Diidentifikasi
1.	Proses perencanaan, penganggaran, pemantauan dan pengawasan layanan	a. Masih ada beberapa OPD yang belum secara spesifik dan maksimal dalam mengalokasikan anggaran untuk penanganan *stunting* b. Manajemen pencatatan & pelaporan yang belum terpusat baik, mulai ditingkat desa, kecamatan sampai ditingkat kabupaten c. Koordinasi antar program secara terintegrasi.
2.	Desain pelaksanaan intervensi / pelaksanaan program	a. Program intervensi terhadap sasaran percepatan penurunan *stunting* : Remaja, PUS, Ibu Hamil, dan Balita. b. Intervensi sasaran Kawasan Rumah Pangan Lestari
3.	Ketersediaan kualitas SDM pelaksana	a. Rasio tenaga tekhnis lapangan kader gizi b. SDM yg sudah terlatih diganti dengan SDM baru yang belum terlatih
4.	Kendala mengakses layanan dari sisi kelompok penerima manfaat	a. Pemahaman terhadap status pencatatan dan pemantauan pertumbuhan b. Tingkat pendidikamn dan pendapatan masyarakat.

Rembug stunting ini menghasilkan kesepakatan/ komitmen dalam Aksi Percepatan Penurunan Stunting dengan melibatkan seluruh lintas sektor, kecamatan, desa, akademisi, NGO, dan berbagai pemangku kepentingan di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi. Selain itu, untuk memperkuat

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

dukungan publik terhadap Aksi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Sigi, Pemerintah Kabupaten Sigi melakukan publikasi pada kegiatan Rembug Stunting yang dilaksanakan di Kabupaten Sigi.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanti dan Mardhiah (2022), kegiatan intervensi pencegahan dan penanganan prevalensi stunting pada anak balita di Kabupaten Simeulue dilakukan secara bersama-sama maka pemerintah Kabupaten Simeulue mengajak para stakeholder untuk saling bahu membahu menyusun dan melaksanakan langkah-langkah serta strategi yang terbaik untuk mengatasinya. Pemerintah Kabupaten Simeulue berkomitmen untuk mendukung segala hal dan upaya pencegahan dan penanganan stunting, baik itu kebijakan, regulasi, program/kegiatan serta kebutuhan anggarannya. Hal ini merupakan suatu langkah yang penting untuk dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memastikan pelaksanaan rencana, mengingat dampak buruk yang ditimbulkan oleh stunting, karena dalam mencegah masalah stunting, dibutuhkan upaya yang bersifat holistik serta saling terintegrasi (Susanti and Mardhiah, 2022).

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang gerakan nasional serta perbaikan gizi harus disikapi dengan koordinasi yang kuat di tingkat pusat serta aturan main dan teknis yang jelas di tingkat provinsi, Kabupaten/Kota, hingga pelaksana ujung tombak Diseminasi Informasi dan Advocacy perlu dilaksanakan oleh unit teknis kepada stakeholder lintas sektor dan pemangku kepentingan lainnya pada tingkatan yang sama. Kepada jajaran struktural kebawahnya perlu dilakukan knowledge transfer dan edukasi agar mampu menjelaskan dan melakukan pemberdayaan dalam meningkatkan status gizi masyarakat. (Susanti and Mardhiah, 2022).

Peraturan Bupati

Penelitian menunjukkan telah tersedianya regulasi berupa Peraturan Bupati Sigi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* guna mengoptimalkan peran desa dan masyarakat dalam penurunan stunting. Adapun peraturan Bupati Sigi tersebut antara lain mengatur mengenai kewenangan desa dalam pelaksanaan intervensi gizi melalui APBD Desa, peran Kecamatan dan Desa, dukungan insentif bagi kader, publikasi dan komunikasi perubahan perilaku. Tentunya regulasi yang ada ini dapat memberikan kepastian hukum bagi desa, sehingga desa tidak ragu-ragu untuk mengalokasikan dana desa ataupun APB desa untuk kegiatan terkait penanganan stunting.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanti & Nellis (2021) di Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahwa Peraturan Bupati/Walikota (pada Aksi 4) yang dimaksud disini adalah peraturan yang menjelaskan peran dan kewenangan desa yang digunakan sebagai rujukan bagi pemerintah desa dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran dari APBDesa termasuk Dana Desa untuk melaksanakan kegiatan integrasi intervensi penurunan stunting di tingkat desa. (Picauly, 2021).

Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Iqbal & Yusran (2021) di Kota Padang, Kota padang belum melakukan upaya perencanaan yang konvergen. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun ataupun dikeluarkan oleh PemKot Padang sehingga belum ada anggaran khusus untuk stunting. Kemudian, perencanaan belum terlaksana secara konvergen karena pemerintah Kota Padang belum memiliki peraturan khusus untuk pencegahan stunting.(Iqbal and Yusran, 2021).

Kader Pembangunan Manusia (KPM)

Pemerintah Kabupaten Sigi telah membentuk Kader Pembangunan Manusia (KPM) dari 176 Desa yang ada telah terbentuk 176 Kader Pembangunan Desa dalam hal ini kabupaten sigi telah mencakup capaian 100%, para kader ini terdiri dari warga masyarkat desa tersebut, hal ini menunjukkan setiap desa telah memiliki kader yang dibentuk, hasil ini dibuktikan dengan adanya SK KPM yang

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

diterbitkan. Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi juga telah melakukan pembinaan dan peningkatan kualitas Kader Pembangunan Manusia agar tiap desa memiliki Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang berdaya.

Hasil ini sejalan dengan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting yang disusun oleh pemerintah dan Lembaga terkait Bahwa semua desa fokus wajib memiliki seorang kader yang berfungsi sebagai KPM untuk memastikan terselenggaranya intervensi pencegahan stunting di tingkat desa dan melakukan pendataan dan pelaporan secara berkala.(TNP2K RI, 2018b). Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanti & Nellis (2021) di Kabupaten Simeulue bahwa KPM (Kader Pembangunan Manusia) yang dibentuk merupakan warga masyarakat desa yang dipilih melalui musyawarah desa untuk membantu Pemerintah dalam memfasilitasi dan mengawasi kegiatan pembangunan di seluruh Desa di Kabupaten Simeulue.(Susanti and Mardhiah, 2022).

Hasil ini sejalan dengan Picauly (2021) bahwa Pemerintah kabupaten/kota perlu melakukan pembinaan bagi desa untuk memastikan efektivitas mobilisasi kader yang berfungsi sebagai kader pembangunan manusia (KPM) yang akan membantu desa dalam memfasilitasi integrasi intervensi penurunan stunting di tingkat desa. Kader tersebut berasal dari masyarakat sendiri seperti kader Posyandu, guru PAUD, dan kader lainnya yang terdapat di desa. (Picauly, 2021).

Hasil ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Picauly et al (2020), di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur bahwa pelaksanaan aksi konvergensi masih di hadapkan pada kendala kader yang ikut pelatihan tidak sama dengan kader yang namanya muncul di SK Kepala Desa. Akhirnya, kondisi ini memperburuk situasi karena kader yang datang tidak tahu kerja dan apa tugasnya (Picauly *et al.*, 2020).

Pemerintah Kabupaten Sigi juga telah menyiapkan anggaran operasional untuk kader Pembangunan Manusia. Dukungan biaya operasional bagi pelaksanaan tugas KPM ini untuk menjamin kualitas dan keberlangsungan peran KPM dalam membantu desa meningkatkan pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi utamanya kepada rumah tangga 1000 HPK. Anggaran ini mencakup biaya Transportasi bulanan sebanyak Rp. 50.000 /kali turun dan biaya operasional rutin Rp. 1.500.000/Tahun. Hasil ini dapat dibuktikan dengan tersedianya data cakupan desa yang telah menganggarkan biaya bagi dukungan operasional Kader Pembangunan Manusia (KPM) di Kabupaten Sigi.

Hasil ini sejalan dengan Teori bahwa salah satu prasyarat keberhasilan intervensi adalah adanya dukungan Alokasi anggaran yang memadai baik di pusat maupun daerah untuk mendanai operasional kegiatan, insentif untuk tenaga termasuk kader, pembinaan, serta monitoring dan evaluasi. (TNP2K RI, 2018a).

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanti & Nellis (2021) di Kabupaten Simeulue, bahwa Tujuan dari pembinaan KPM di seluruh Desa di Kabupaten Simeulue berjalan dengan baik dan kinerja KPM dapat maksimal sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penentuan tugas dan KPM dalam melaksanakan integrasi pencegahan dan penurunan kasus stunting di tingkat desa, telah menetapkan SK Kader Pembangunan Manusia, menganggarkan anggaran operasional Kader Pembangunan Manusia (KPM), menganggarkan anggaran transport local KPM serta Gawai (HP) berbasis Android untuk operasionalisasi penggunaan aplikasi e-HDW seperti, daftar desa yang telah menerbitkan SK Kepala Desa/Lurah tentang penunjang KPM dan daftar desa yang telah menganggarkan operasional KPM (Susanti and Mardhiah, 2022).

Sistem Manajemen Data

Sistem Manajemen data adalah Pengelolaan data di tingkat kabupaten/kota hingga desa yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan sensitive. (TNP2K RI, 2018a). Menurut Susanti dan Mardhiah (2022), Sistem Manajemen Data Merupakan suatu sistem sebagai pengelola suatu basis data serta menjalankan operasional terhadap data yang diminta seperti

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

banyak jumlah kasus stunting per desa, seperti matriks data prevalensi dan jumlah kasus stunting per desa, matriks data cakupan intervensi tingkat kab/kota, matriks data cakupan intervensi per desa, status realisasi kegiatan perbaikan sistem manajemen data OPD, serta hasil pemetaan kondisi data sebaran stunting dan cakupan intervensi.

Berdasarkan Hasil wawancara, observasi langsung dan telaah dokumen dapat diidentifikasi bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi telah memiliki data yang menjadi prioritas penanganan dalam penanganan stunting. Sistem manajemen data di kabupaten sigi mencakup data-data dari setiap indikator, mulai dari data stunting sampai dengan cakupan intervensi gizi spesifik dan sensitive, pemerintah kabupaten sigi juga telah memiliki data jumlah kasus stunting per desa, cakupan inytervensi per desa serta hasil pemetaan sebaran stunting. Dari data yang telah tersedia Bappeda dan perangkat daerah yang terlibat telah menyepakati dan terus melakukan perbaikan data agar tingkat rincian lebih baik, lebih berkualitas, dan lebih *accessible* bagi lintas sektor. Pemerintah Kabupaten Sigi dalam hal ini Dinas Kesehatan menggunakan sistem E-PPGBM sesuai dengan anjuran dari Kementerian Kesehatan sebagai system pencatatan data. Kabupaten Sigi juga telah memiliki rencana perbaikan sistem manajemen data berdasarkan hasil assesment (> 100%).

Menurut Picauly (2021), sistem manajemen data intervensi penurunan *stunting* (Aksi 6) merupakan upaya pengelolaan data di tingkat kabupaten/kota sampai dengan tingkat desa yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan aksi-aksi integrasi lainnya, serta dimanfaatkan untuk membantu pengelolaan program/kegiatan penurunan stunting terintegrasi. Sistem manajemen data mencakup data-data dari setiap indikator mulai dari data stunting sampai dengan cakupan intervensi gizi spesifik dan sensitif.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menyusun sebuah sistem informasi gizi terpadu berbasis daring yang berguna untuk memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan asuhan gizi di Puskesmas secara berkala bagi masyarakat Indonesia. Pencatatan dan pelaporan tersebut dilakukan melalui sistem informasi E-PPGBM (Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat). Mekanisme pelaporan dan pencatatan yang digunakan pelaksanaan sistem ini adalah menggunakan pendekatan partisipatif.

Hasil ini sesuai dengan hasil Analisis Situasi Prevalensi *Stunting* yang dilakukan di Kab. Grobogan (Tingkat Kabupaten) bahwa Pemerintah Kabupaten Grobogan sejak Tahun 2017 telah menggunakan sistem informasi E-PPGBM (Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat). Untuk memetakan kondisi pemenuhan gizi masyarakat, khususnya terkait dengan kondisi gizi bayi dan ibu hamil. Dari kedua indikator tersebut akan dapat ditemukan jumlah kasus bayi stunting di Kabupaten Grobogan. Sistem informasi E-PPGBM selain digunakan untuk melakukan pencatatan dan pelaporan kondisi asuhan gizi masyarakat, juga digunakan sebagai media kontrol bagi pemerintah daerah untuk melihat sejauh mana intervensi telah dilakukan kepada masyarakat yang mengalami permasalahan dalam asuhan gizi (Bappeda Kabupaten Grobogan, 2020).

Hasil ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Picauly (2021), pada 21 Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur diketahui bahwa banyak OPD yang belum paham terkait proses pengumpulan data sampai pelaporan, walaupun semua program konvergensi sudah dijalankan dengan baik. Selain itu, masih ada beberapa OPD yang masih terikat dengan mekanisme pelaporan yang langsung ke pusat seperti Dinas P2KB, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan Dinas PUPR. Nilai odd ratio menunjukkan bahwa pelaksanaan aksi konvergensi 6 dapat berpengaruh sebesar 1,917 kali terhadap peningkatan cakupan program intervensi gizi sensitif.

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

Pengukuran dan Publikasi Stunting

Pengukuran pertumbuhan dan perkembangan dilakukan oleh tenaga kesehatan secara rutin baik setiap bulan ataupun pada bulan penimbangan balita serta pelaporan melalui web sigiziterpadu.gizi.kemkes.go.id/ dengan target cakupan minimal mencapai 80%.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi melakukan pengukuran dengan total cakupan pada tahun 2020 sebanyak 95,61% pada tahun 2021 sebanyak 97% melebihi cakupan minimal. Pengukuran ini dilakukan oleh petugas Kesehatan, selanjutnya dilakukan analisa, pelaporan, dan publikasi hasil pengukuran yang telah di peroleh melalui web sigiziterpadu.gizi.kemenkes.go.id/. Pengukuran ini dilakukan setiap bulannya dan dilakukan analisa untuk setiap pengukurannya. Hasil pengukuran tersebut selanjutnya dipublikasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi untuk memperkuat komitmen dalam Gerakan bersama untuk penurunan stunting. Pentingnya pengukuran dan publikasi stunting ini dikarenakan semakin baik proses pengukuran dan publikasi maka dapat berpengaruh terhadap pencapaian cakupan program intervensi termasuk penurunan prevalensi stunting.

Pengukuran dan publikasi data stunting adalah mengukur dan mempublikasikan angka prevalensi stunting tingkat desa hingga kabupaten/kota. Dalam panduan, keterbukaan infomasi stunting adalah upaya Desa dalam memperoleh dan mempublikasikan data konvergensi pencegahan stunting berbasis desa. Data diperoleh melalui serangkaian kegiatan identifikasi, perencanaan dan data hasil pengukuran. Hasil pengukuran serta publikasi angka stunting digunakan untuk memperkuat komitmen pemerintah Desa dan masyarakat dalam gerakan bersama pencegahan stunting. (Kementerian Desa PDTT, 2018).

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanti & Mardhiah (2022), di Kabupaten Simulue bahwa Pengukuran dan Publikasi Stunting yang dilakukan merupakan upaya Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memperoleh data prevalensi stunting pada anak balita di Kabupaten Simeulue terkini pada skala pelayanan Puskesmas, Kecamatan dan Desa.(Susanti & Mardhiah, 2022).

Pengukuran dan publikasi angka stunting (Aksi 7) adalah upaya pemerintah kabupaten/kota untuk memperoleh data prevalensi stunting terkini pada skala layanan puskesmas, kecamatan, dan desa. Penelitian yang dilakukan oleh Picauly (202) pada 21 kabupaten di Propinsi NTT menunjukkan bahwa 76,2% mempunyai cakupan program intervensi baik walaupun masih terbatas dalam aspek publikasi data. Semakin baik proses pengukuran dan publikasi maka dapat berpengaruh terhadap pencapaian cakupan program intervensi termasuk penurunan prevalensi stunting. (Picauly, 2021)

Review Kinerja

Review Kinerja adalah penilaian pemerintah Kab/Kota terkait pencegahan stunting selama 1 tahun terakhir (TNP2K RI, 2018a). Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi telah melakukan review kinerja yang membahas capaian target output, serapan anggaran, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* 2021.

Dalam kegiatan review yang telah dilakukan dilaporkan aspek-aspek berupa : Reviu capaian target output, Reviu serapan anggaran dan Reviu permasalah dan kendala. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanti & Mardhiah (2022) bahwa evaluasi kinerja tahunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dari kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan dan penanganan prevalensi stunting pada anak balita selama satu tahun terakhir tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja dari Pemerintah Kabupaten Simeulue.

Reviu Kinerja Tahunan (Aksi 8) adalah reviu yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota terhadap kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan stunting selama satu tahun terakhir. Penyelenggaraan intervensi penurunan stunting terintegrasi merupakan tanggung jawab bersama lintas sektor. Untuk itu, diperlukan sebuah tim lintas sektor sebagai pelaksana Aksi Integrasi. Keanggotaan tim lintas sektor tersebut sekurang-kurangnya mencakup instansi yang menangani

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

kesehatan, pertanian, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, pendidikan, perindustrian, sosial, agama, komunikasi dan informasi, pekerjaan umum/cipta karya/perumahan dan pemukiman, pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan catatatan sipil dan keluarga berencana, dan pengawasan obat dan makanan (Picauly, 2021).

Pemerintah Kabupaten Sigi dalam melaksanakan aksi 8 yaitu review kinerja melibatkan lintas sektor yaitu Sekertariat Daerah Kabupaten Sigi, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sigi, Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sigi dan Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Sigi.

CONCLUSIONS

Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi telah melakukan upaya percepatan penurunan *stunting* dengan melaksanakan pilar strategi penurunan *stunting* melalui penerapan 8 aksi konvergensi yang secara garis besar memperlihatkan terjadi penurunan persentase kasus stunting dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir dimana tahun 2020 sebesar 16,59% turun menjadi 14,40% ditahun 2021.

Upaya percepatan penurunan stunting yang telah dilakukan melalui aksi konvergensi dapat terlihat seluruh kegiatan yang dilaksanakan telah terencana, diarahkan dan dialokasikan untuk mendukung kegiatan prioritas terutama untuk peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan gizi utamanya intervensi 1000 HPK.

RECOMMENDATIONS

Dalam upaya percepatan penurunan stunting yang akan terus dilakukan sampai dengan tahun 2024 perlu dilakukan penguatan antara lain 1). Pembagian peran pada setiap kegiatan yang termuat di dalam rencana kerja, sehingga masing-masing bertanggung jawab menyusun langkah-langkah kerja tekhnis. 2). Melakukan Rapat evaluasi setiap 3 (tiga) bulan untuk dapat memantau secara periodik seluruh kegiatan instervensi dan 3). Secara khusus hasil pemantauan bulanan dapat dilaporkan sehingga setiap perangkat daerah/penanggung jawab program intervensi dapat kembali melakukan perbaikan.

Declaration of Conflicting Interest

The author (s) declared no potential conflict of interest with respect to the research, authorship, and/or publication of this article.

REFERENCES

Bappeda Kabupaten Grobogan (2020) *Hasil Analisis Situasi Prevalensi Stunting di Kab. Grobogan (Tingkat Kabupaten)*, *Bappeda Kabupaten Grobogan*.

Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi (2021) *Laporan Aksi Konvergensi Stunting*.

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah (2021) *Gerakan Masyarakat Hidup Sehat*. doi:10.1515/9783486713459-024.

Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri (2021) *Petunjuk Teknis Penilaian Pemerintah Provinsi Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting*.

Iqbal, M. and Yusran, R. (2021) 'Upaya Konvergensi Kebijakan Pencegahan Stunting Di Kota Padang', *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 3(2), pp. 109–116. doi:10.24036/jmiap.v3i2.245.

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

Kemenkes RI (2018) 'Hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018', *Kementrian Kesehatan RI*, 53(9), pp. 1689–1699.

Kementerian Kesehatan RI (2020) *Rencana Aksi Program 2020-2024*.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (2019) *Petunjuk Teknis Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten/Kota*.

Khairani, Mursyita, A. and Darmawan, S. (2020) *Situasi Stunting di Indonesia*, *Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI*. Available at: https://pusdatin.kemkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/buletin/buletin-Situasi-Stunting-di-Indonesia_opt.pdf.

LPPKM UNNES (2022) *Panduan UNNES Giat Pencegahan dan Penanganan Stunting*.

Muchlis, N., Yusuf, R. A., Rusydi, A. R., Mahmud, N. U., Hikmah, N., Qanitha, A., & Ahsan, A. (2023). Cigarette Smoke Exposure and Stunting Among Under-five Children in Rural and Poor Families in Indonesia. *Environmental Health Insights*, *17*, 11786302231185210.

Pemerintah Kabupaten Sigi (2020) *Peraturan Bupati Sigi Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Percepatan penurunan Stunting*.

Picauly, I. *et al.* (2020) 'Pendampingan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur', *Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Kepulauan Lahan Kering*, 1(2), pp. 44–56.

Picauly, I. (2021) 'Pengaruh Pelaksanaan Aksi Konvergensi Stunting Terhadap Cakupan Program Intervensi Gizi Sensitif di Propinsi Nusa Tenggara Timur', 10(2), pp. 71–85.

Saputri, R.A. (2019) 'Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Stunting Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung', *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 2(2), pp. 152–168. doi:10.36341/jdp.v2i2.947.

Pemerintah Kabupaten Sigi (2021) *Peraturan Bupati Sigi Nomor 440-017 Tahun 2021 Tentang Tim Intervensi Upaya Percepatan penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Sigi*.

Susanti, M. and Mardhiah, N. (2022) 'Strategi Pemerintah Simeulue dalam Penanganan Prevalensi Stunting pada Anak Balita', *Journal of Social and Policy Issues*, 1, pp. 1–6.

TNP2K RI (2018a) *Panduan Konvergensi Program/Kegiatan Percepatan Pencegahan stunting*,

TNP2K sekretariat wakil presiden Republik Indonesia. Available at: http://tnp2k.go.id/filemanager/files/Rakornis 2018/Panduan Konvergensi Program Kegiatan Percepatan Pencegahan Stunting.pdf.

TNP2K RI (2018b) *Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) periode 2018-2024*. Jakarta.

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license